BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan, termasuk pada aspek pelayanan publik. Pemerintah Indonesia mengatasi hal ini dengan menerbitkan regulasi yang mendorong implementasi digitalisasi di semua tingkatan, termasuk di tingkat desa. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Regulasi tersebut memberikan arahan agar pemerintah desa dapat memanfaatkan teknologi digital dalam mendukung pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan inklusif.

Namun, tidak semua desa mampu mengimplementasikan arah kebijakan tersebut secara optimal. Terutama bagi desa yang tergolong baru dan berada di wilayah dengan keterbatasan sumber daya. Salah satunya adalah Desa Biring Kassi. Desa Biring Kassi Merupakan hasil pemekaran sejak 2022 dan memiliki luas wilayah ± 0,68 Km^2 (kurang lebih nol koma enam delapan kilometer persegi), terbagi dalam lima dusun yaitu Dusun Tamanroya, Dusun Karama Selatan, Dusun Karama Tengah, Dusun Karama Utara, Dusun Ujung Kassi, dan dihuni oleh 2.471 jiwa atau 711 kepala keluarga (Republik 2022). Secara geografis dan demografis, kondisi desa yang relatif kecil dan baru berdiri ini menghadapi tantangan dalam hal pemanfaatan teknologi informasi.

Indonesia masih menghadapi tantangan kemiskinan desa, dengan persentase penduduk miskin nasional mencapai sekitar 9,54% pada 2022 dan lebih dari 17.000 desa belum berstatus mandiri (Ayuningtyas 2025). Di tingkat

provinsi, Sulawesi Selatan mencatat sejumlah desa tertinggal (Badan Pusat Statistik Indonesia 2019), menandakan belum meratanya pembangunan. Khususnya di Kabupaten Takalar, angka kemiskinan stabil di kisaran 8,25% sejak 2022 (Kamal, Bakhtiar, and Susanti 2023), menunjukkan bahwa hampir satu dari dua belas warga masih hidup di bawah garis kemiskinan. Desa Biring Kassi, sebagai desa hasil pemekaran yang baru berdiri tiga tahun lalu, memiliki 2.471 jiwa dengan sebagian besar bekerja sebagai nelayan dan memiliki akses serta literasi digital yang terbatas. Kondisi ini diperparah oleh masih dilakukannya seluruh proses administrasi secara manual, sehingga warga harus menempuh perjalanan jauh dan menghabiskan waktu lama hanya untuk mengurus surat keterangan atau izin.

Dengan latar sosial ekonomi seperti itu, digitalisasi desa khususnya melalui *platform* daring menjadi sangat krusial. Akses informasi dan layanan publik yang didigitalisasi dapat memangkas birokrasi, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini tidak hanya memperingan beban masyarakat, tetapi juga memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan responsif. Karena itu, perkembangan digitalisasi desa di wilayah Biring Kassi merupakan langkah yang sangat dibutuhkan.

Berdasarkan hasil pendampingan yang dilakukan oleh tim Pengabdian Masyarakat Politeknik STIA LAN Makassar pada tahun 2024, mayoritas penduduk desa ini bekerja sebagai nelayan, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dan masih belum terjamah sepenuhnya oleh perkembangan teknologi. Dalam rangka mendukung proses digitalisasi desa, telah dilakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dan pendampingan oleh tim pengabdian kepada masyarakat. Dari hasil diskusi dan identifikasi kebutuhan, disepakati bahwa desa membutuhkan platform digital sebagai media informasi dan

pelayanan. Sebagai bentuk respons awal, telah dibuat sebuah *Website* desa dalam waktu singkat, sekitar 1–2 bulan. *Website* tersebut saat ini hanya menampilkan beberapa konten dasar seperti profil desa, potensi desa, galeri, dan informasi pelayanan publik. Namun, informasi yang tersedia masih bersifat satu arah dan statis. Belum terdapat layanan interaktif yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses atau mengurus layanan secara daring melalui *Website* tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun *Website* telah tersedia, implementasi digitalisasi di Desa Biring Kassi masih berada pada tahap awal. Keterbatasan fitur, minimnya konten yang aktual, dan belum adanya layanan berbasis digital menjadi hambatan dalam menciptakan sistem pelayanan yang modern, responsif, dan partisipatif. Sementara di sisi lain, regulasi nasional terus mendorong agar desa mampu bertransformasi digital dan menjadi bagian dari sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Untuk itu, perlu adanya satu perubahan yang dapat mendukung implementasi kebijakan digitalisasi di tingkat desa. Sehingga, peneliti ingin melakukan inovasi terhadap *Website* desa ini agar mampu menjawab kebutuhan informasi dan pelayanan masyarakat secara lebih baik di masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana digitalisasi melalui *Website* desa meningkatkan aksebilitas layanan publik di Desa Biring Kassi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendorong peningkatan aksebilitas layanan publik di Desa Biring Kassi melalui digitalisasi, sehingga masyarakat dapat lebih mudah, cepat, dan efisien dalam mengakses informasi yang dibutuhkan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
    a. Penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan di lingkungan kampus Politeknik STIA LAN Makassar mengenai pemanfaatan digitalisasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik berbasis desa.
    b. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya dalam mengembangkan kajian seputar digitalisasi layanan, khususnya pada konteks pemerintahan desa.
    c. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur administrasi publik, khususnya dalam penggunaan media digital sebagai alat penyampaian informasi pelayanan kepada masyarakat.
2. Manfaat Praktis
    a. Memberikan kemudahan bagi aparat desa dalam menyampaikan informasi layanan secara lebih cepat dan efisien melalui media digital.
    b. Mempermudah masyarakat Desa Biring Kassi dalam mengakses informasi layanan publik kapan saja tanpa harus datang langsung ke kantor desa.
    c. Menjadi dasar pertimbangan bagi Pemerintah Desa Biring Kassi dalam melakukan pengembangan *Website* desa agar lebih informatif, responsif, dan bermanfaat bagi masyarakat.